

Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik
(Studi Pemberdayaan dan Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan)

Fatri Badalia
J. Mandey

Abstract: *Less maximum dissemination and provision of information to the public related to the performance of labor and social services taransmigration Banggai archipelago in the management of data and information on empowerment and social assistance, it is in because of the limited resources that is owned by implementing policies in terms of both quality and quantity that affects the policy implementation process. lack of knowledge and insight into people's governance, especially the empowerment and social assistance, the maximum is less influenced by the provision of such information. The method used is descriptive qualitative research that describes the facts on the ground. Using data collection techniques, observation techniques, interviews, library research and documentation. The results showed that the public disclosure in view of three dimensions, namely, the ease of accessing the information, accurate and adequate information, the disclosure of information. Of the three dimensions, ease in obtaining the information are not enough in get by society, because human resources are owned by the apparatus implementing policies that are low or utilization of human resources have not been adequate. The conclusion that can pull in this study is that the public disclosure policy implementation has been accomplished, but not maximized, due to the utilization of human resources is not adequate in that agency. It is suggested that the government should undertake formal education.*

Keywords: *public disclosure policy implementation, empowerment and social assistance*

Dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28F, di sebutkan bahwa setiap orang berhak untukberkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembnagkan pribadi, dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, dan memiliki, serta menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis salauran yang tersedia. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Hak informasi sangat penting, karena makin terbuka penyelenggaraan Negara untuk di awasi publik.

Kurang maksimalnya sosialisasi atau pemberian informasi kepada masyarakat kaitannya dengan kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabuapaten Banggai Kepulauan, dalam pengelolaan data dan informasi mengenai

*Fatri Badalia adalah Mahasiswa Program Studi Adm Publik FISIP Unsrat
J. Mandey adalah Dosen Program Studi Administrasi Publik FISIP Unsrat*

data serta informasi mengenai pemberdayaan dan bantuan sosial, hal ini di karenakan masih terbatasnya sumber daya yang di miliki oleh pelaksana kebijakan sehingga mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Laswell dan Kaplan (dalam Lubis 2007), melihat kebijakan sebagai “sarana” untuk mencapai “tujuan”. Kebijakan itu tertuang dalam “program” yang di arahkan kepada pencapaian “tujuan”, “nilai” dan “praktek” “(a projected program of goals, values, and practices Menurut Peters (dalam Hakim, 2011) mengartikan kebijakan publik sebagai total kegiatan pemerintah, baik yang di lakukan langsung atau melalui pihak lain, yang berpengaruh pada kehidupan penduduk di Negara itu.

Munurut Sujatno (dalam Lagantondo, 2012) transparansi adalah upaya menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Menurut Achmadi Adib dkk (2002), Tansparansi di bangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga - lembaga dan informasi perlu dapat di akses oleh pihak - pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan di pantau. Transparansi secara gamblang menjelaskan sebuah perintah untuk membuka komunikasi secara jujur dan terbuka didunia tak terbatas yang telah di ubah oleh teknologi dimana dampkanya terlihat terlihat di banyak badan hukum dan politik, (dalam Bennis Warren dkk)

Menurut Davis (dalam Sugandi, 2011), informasi adalah data yang telah di olah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat atau mendatang. Murdick (dalam Sugandi, 2011). Informasi adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan dapat berupa fakta, suatu nilai yang bermanfaat. Publik di kaitkan dengan keberanian para warga negara untuk menggunkan rasionya secara sendiri di hadapan umum tanpa campur tangan otoritas (Hardiman, 2010).

Kelsey dan Hearne (dalam Mardikanto,2012) yang menyatakan bahwa falsafah pemberdayaan harus berpijak kepada pentingnya pengembangan individu dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya, karena itu ia mengemukakan bahwa: falsafah pemberdayaan adalah: *bekerja bersama masyarakat* untuk membantunya agar dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia (*helping people to help them-selves*).

Bantuan sosial atau yang kerap di sebut juga sebagai bantuan publik (*public assistance*) dengan pelayanan kesejahteraan (*welfare services*) mencakup tunjangan uang, barang atau pelayanan sosial yang di tunjukan untuk membantu atau melindungi individu, keluarga dan komunitas yang paling rentan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningktkan kualitas hidupnya, (Suharto, Edi 2009).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan fakta di lapangan. Fokus penelitian ini adalah keterbukaan informasi publik dalam Pemberdayaan dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigarsi Kabupaten Banggai kepulauan. Keterbukaan Informasi di definisikan sebagai upaya menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin

kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. dalam penelitian keterbukaan informasi dilihat dari tiga hal yaitu kemudahan dalam memperoleh informasi, akurat dan memadainya informasi dan keterbukaan informasi. Data dan jenis data yang di kumpulkan berupa data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang bersumber langsung dari informern sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen - dokumen pelengkap data primer.

Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah sebagai berikut: (1) Observasi adalah melihat langsung kejadian-kejadian atau tindakan-tindakan yang di lakukan informan, (2) Pedoman wawancara yang berisi panduan wawancara dan daftar pertanyaan terbuka di mana informan memberikan jawaban atas pertanyaan yang di ajukan, (3) Studi Dokumentasi yakni pengumpulan dan penelaan data melalui dokumen-dokumen tertulis yang tersedia di lokasi penelitian, (4) Studi kepustakaan yakni memperoleh melalui bacaan berupa buku-buku dan laporan penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah para pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan bidang pemberdayaan dan bantuan sosial sebanyak 4 orang dan masyarakat yang menerima akses pelayanan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten banggai Kepulauan sebanyak 23 orang.

Analisis data yang di gunakan adalah: (1) Reduksi data, adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, mefokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema polanya (Sugiyono, 2010), (2) Display/penyajian data, bertujuan data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan muda di pahami, (3) Mengambil kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana wawancara yang telah di lakukan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan pada Bulan Maret 2013, seperti yang di sampaikan oleh Ketua Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial Ibu Nonce Yaalis SH, bahwa dalam melaksanakan program atau kebijakan mengenai Pemberdayaan dan Bantuan Sosial di informasikan kepada Masyarakat melalui sosialisasi. Sosialisasi yang di lakukan oleh Pemerintah terkait dengan kebijakan ataupun Program Pemberdayaan dan Bantuan Sosial dalam setahun sebanyak dua sampai tiga kali.

Kemudian ketika ada keluhan – keluhan atau pertanyaan dari Masyarakat menyangkut dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pelaksana kebijakan, itu akan segera diberikan penjelasan dan pemahaman kepada Masyarakat terkait dengan hal tersebut. Kalau dilihat secara umum proses pelaksanaan Pemberdayaan dan Bantuan Sosial yang di laksanakan oleh pemerintah sudah mengena pada sasaran, karena dalam melaksanakan program tersebut mengacu pada aturan yang telah di tetapkan atau di tentukan.

Dalam pelaksanaan program kerja organisasi selalu di dukung dengan berbagai sumber daya, baik Sumber Daya Material maupun Sumber Daya Manusia. Pemanfaatan Sumber Daya Material dalam pelaksanaan program atau kebijakan sudah memenuhi standar kebutuhan oprasional. Namun dalam pemanfaatan Sumber Daya Manusia, khususnya Bidang Pemerdayaan dan Bantuan Sosial masih belum memenuhi standar kebutuhan, karena para Pegawai

yang berada di lingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan, Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial, masih ada beberapa Pegawai yang mempunyai tingkat Pendidikan tertinggi, setara dengan lulusan SMA/MA, sehingga dalam pemanfaatan Sumber Daya Manusia belum memadai atau maksimal.

Sebagaimana wawancara yang di lakukan pada Bulan Maret 2013, kepada masyarakat yang menerima akses pelayanan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan, lebih Khusus Bidang Pemeberdayaan dan Bantuan Sosial secara umum, Masyarakat menilai dalam melaksanakan program ataupun kebijakan yang menyangkut dengan pemberdayaan dan bantuan sosial, pemerintah bersifat terbuka. Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengakses berbagai informasi, Pemerintah juga sangat cepat menanggapi atau merespon aspirasi yang datang dari masyarakat. Ini terlihat di beberapa kecamatan yang ada di Kabupten Banggai Kepulauan, pemerintah sangat memperhatikan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berada di kecamatan Bulagi Selatan, dengan mengadakan pendataan Penyandang Masalah Kesejatraan Sosial (PMKS), pemerintah juga memberikan dana untuk pembuatan usaha yang di lakukan oleh Masyarakat pada Kecamatan Labobo dan bantuan dana untuk program kelompok usaha bersama, program keluarga harapan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pemberdayaan komunitas adat terpencil, pertumbuhan program Fakir Miskin di Kecamatan Liang dan Forum Keresasian Sosial Berbasis Masyarakat di Desa Kalapa Lima Kecamatan Banggai Selatan.

Dengan demikian hasil penelitian yang Penulis lakukan, maka secara umum pelaksanaan dari program Pemberdayaan dan Bantuan Sosial sudah terlaksana namun belum maksimal, dalam artian Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan, khususnya pada Bidang Pemberdyaan dan Bantuan Sosial, sudah terlaksana meskipun masih ada faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program serta Kebijakan Pemberdayaan dan Bantuan Sosial tersebut.

Namun, selaku Pemerintah yang bernaung dibawah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, akan berusaha secara terus menerus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, dan juga pelaksanaan dari program Pemberdayaan dan Bantuan Sosial, akan terus di lakukan secara tahap pertahap.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di tarik kesimpulan dalam penelitian ini bahwa secara umum, kebijakan keterbukaan informasi publik sudah di laksanakan atau di implementasikan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigarsi Kabupaten Banggai Kepulauan, khususnya bidang pemberdayaan dan bantuan sosial. Namun, dalam pelaksanaannya belum maksimal, karena masih terdapat faktor yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini terlihat dengan adanya pemanfaatan Sumber Daya Manusia yang belum memadai atau belum tepat sasaran dalam lingkungan pemerintah atau pelaksana kebijakan, di mana masih ada para pegawai/pelaksana kebijakan yang memiliki jenjang pendidikan tertinggi hanya setingkat SMA/SLTA.

B. Saran

Pemerintah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan perlu mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mewujudkan maksimalisasi pelayanan publik, dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan untuk para pegawai yang belum mempunyai Sumber Daya Manusia yang memadai di instansi tersebut. Pendidikan formal yaitu melakukan izin belajar atau tugas belajar (studi lanjut untuk S1, S2, maupun S3). Untuk pendidikan non formal (pelatihan), pemerintah perlu mengadakan kursus pemanfaatan Internet untuk para pegawai yang ada di instansi tersebut. pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan dan serta memajukan kemampuan dan keterampilan para personil Dinas terkait, dalam rangka menciptakan pelayanan prima berbasis *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Solly Lubis, M. 2007. *Kebijakan Publik*, Bandung: Mandar Maju.
- Hakim, L. Em. 2011, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media
- Lagantondo, H. 2012. *Proposal Tesis (Kajian Implementasi Good Governance dalam Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso* Universitas Sam Ratulangi Manado 2012.
- Bennis Warren dkk, 2009. *Bagaimana pemimpin menciptakan budaya keterbukaan*, Jakarta: Libri
- Hardiman, B.F. 2010. *Ruang Publik*, Yogyakarta: Kanisius.
- Mardikanto dan Soebiato.2012. *Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Sugandi, S.Y. 2011, *Administrasi Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Achmadi Adib dkk, 2002 *Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah*, Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia.
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Unversal Bidang Kesehatan*, Bandung: Alfabeta